**DISRUPSI HIJAU DAN LANSKAP EKONOMI NASIONAL**

 ****

**Prof. Perdana Wahyu Santosa, CRP, CSA, QWP**

*Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan*

*Direktur Riset GREAT Institute*

Fenomena IPO **Barito Renewables Energy (BREN)** pada 2023–2024 hingga mencapai kapitalisasi pasar ratusan triliun rupiah menjadi salah satu tonggak bersejarah di pasar modal Indonesia. Investor berbondong-bondong masuk, hingga BREN sempat masuk jajaran top 5 emiten terbesar di Bursa Efek Indonesia. Euforia ini bukan sekadar kisah sukses sebuah perusahaan, melainkan cermin bagaimana energi terbarukan semakin dipandang sebagai masa depan. Bagi masyarakat luas, BREN adalah simbol baru: bahwa Indonesia bisa melahirkan “raksasa hijau” yang dipercaya global. Namun, di balik euforia tersebut, pertanyaan besar bergema: apakah IPO BREN benar-benar menandai transformasi ekonomi nasional menuju energi bersih, atau hanya sekadar “mimpi hijau” yang belum tentu terwujud? Disrupsi hijau memang tengah mengetuk pintu kita, tetapi apakah kita sudah siap membukanya?

Potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar. Data Kementerian ESDM menyebutkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) kita bisa mencapai lebih dari **400 GW**, terutama dari tenaga surya, panas bumi, dan hidro. Namun baru sekitar **13 GW** yang berhasil dimanfaatkan. Itu artinya, peluang masih terbuka lebar. IPO BREN menunjukkan investor percaya akan masa depan ini, bahkan ketika transisi energi global penuh tantangan. Bagi generasi muda, energi terbarukan bukan sekadar wacana teknis, melainkan cita-cita tentang masa depan planet yang lebih layak huni. Momen ini ibarat angin segar: kita punya pasar besar, investor siap, dan kebutuhan energi bersih makin mendesak. Tetapi peluang tidak akan otomatis berubah menjadi kekuatan tanpa kebijakan yang konsisten dan *roadmap* yang jelas. Dunia sedang bergerak cepat—jika kita terlambat, peluang emas ini bisa direbut oleh negara lain yang lebih gesit, seperti Vietnam atau India.

Namun jalan menuju energi hijau tidak pernah mulus. Investasi energi terbarukan membutuhkan biaya awal yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga surya atau angin misalnya, butuh infrastruktur besar dan teknologi penyimpanan energi yang mahal. Sementara APBN Indonesia masih terbatas, apalagi dengan tekanan subsidi energi fosil yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Di sisi lain, ketergantungan pada batu bara masih tinggi: lebih dari **60% listrik nasional** masih berbasis batu bara. Menutup batu bara terlalu cepat bisa memicu guncangan fiskal dan sosial, terutama di daerah tambang. Ini adalah dilema klasik: bagaimana mengurangi emisi tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan tenaga kerja. Seperti orang yang ingin diet sehat, tetapi masih tergantung pada makanan instan dan *junk food* sehari-hari—mudah diucapkan, sulit dilakukan.

**Risiko *Greenwashing***

Ketika tren hijau menjadi populer, risiko ***greenwashing*** ikut membayangi. Banyak perusahaan berlomba menyebut diri “ramah lingkungan”, padahal praktiknya masih jauh dari itu. Investor global sangat sensitif terhadap isu ini. Jika kepercayaan mereka runtuh, bukan hanya perusahaan, tetapi reputasi pasar modal Indonesia bisa ikut tercoreng. IPO BREN sejauh ini mendapat apresiasi karena portofolio energinya memang nyata, tetapi pengawasan jangka panjang tetap penting. Laporan keberlanjutan (sustainability report) harus diaudit dengan standar internasional, bukan sekadar formalitas. Masyarakat juga semakin kritis; generasi muda di media sosial cepat sekali membongkar “kepalsuan hijau”. Artinya, keberhasilan sektor energi terbarukan tidak cukup hanya dengan membangun citra, tetapi harus dibuktikan dengan aksi nyata: mengurangi emisi, meningkatkan kapasitas EBT, dan menutup celah ketergantungan pada fosil.

**Dampak Ekonomi dan Sosial**

Jika transisi energi berjalan konsisten, dampaknya bisa luar biasa. Pertumbuhan lapangan kerja baru terbuka: dari teknisi panel surya, insinyur turbin angin, hingga analis ESG. McKinsey memperkirakan transisi energi bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru di Asia Tenggara pada dekade ini. Di Indonesia, peluang ini bisa menjadi jawaban atas masalah pengangguran muda. Selain itu, energi terbarukan memperkuat kemandirian energi nasional. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada impor BBM yang menguras devisa. Pasar modal juga mendapat manfaat: investor institusi global, seperti *sovereign wealth fund* dan dana pensiun internasional, semakin tertarik menanamkan modal pada proyek hijau. IPO BREN hanyalah awal; bisa saja ke depan kita melihat “IPO hijau” lain yang mengangkat sektor geothermal, hydropower, atau bahkan hydrogen. Dengan kata lain, transisi energi bukan sekadar isu lingkungan, tetapi peluang ekonomi baru yang bisa membawa Indonesia naik kelas.

Transisi energi tidak hanya soal angka-angka ekonomi, tetapi juga tentang manusia. Di daerah penghasil batu bara, ribuan pekerja khawatir kehilangan mata pencaharian. Jika transisi dilakukan tanpa strategi sosial, mereka bisa menjadi “korban pembangunan”. Di sinilah konsep ***just transition*** penting: memastikan energi terbarukan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga ramah manusia bahkan sosial. Program reskilling dan upskilling tenaga kerja tambang harus dipercepat, agar mereka bisa pindah ke sektor energi hijau. Pemerintah, perusahaan, dan universitas perlu bekerja sama menyediakan pendidikan vokasi baru. Masyarakat luas juga perlu dilibatkan dalam program energi bersih, misalnya lewat panel surya atap untuk rumah tangga. Dengan begitu, transisi energi bukan sekadar proyek elit, melainkan gerakan bersama. Jika tidak, transisi hijau akan dianggap eksklusif—hanya menguntungkan investor besar, sementara rakyat kecil merasa ditinggalkan.

**Rekomendasi Strategis**

Ada beberapa langkah strategis yang perlu segera ditempuh. **Pertama**, pemerintah harus menyusun **roadmap energi terbarukan** yang realistis dan konsisten, dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang yang jelas. **Kedua**, melalui Menteri Keuangan yang baru insentif fiskal dan non-fiskal perlu diperkuat: bukan hanya *tax holiday*, tetapi juga akses pembiayaan murah, *feed-in tariff* yang menarik, serta pasar karbon domestik yang likuid. **Ketiga**, transparansi harus dijaga: laporan ESG wajib diaudit dan dipublikasikan dengan standar global. **Keempat**, kolaborasi internasional diperluas, baik dengan negara ASEAN maupun mitra G20, untuk transfer teknologi dan investasi hijau. Kelima, pendekatan sosial jangan dilupakan—program transisi bagi pekerja fosil harus masuk prioritas. Energi hijau hanya akan sukses jika dilihat bukan hanya sebagai proyek ekonomi, tetapi juga sebagai gerakan keadilan sosial. Dengan strategi seperti ini, IPO BREN bisa menjadi pemicu perubahan nyata, bukan sekadar fenomena sesaat.

**Penutup**

IPO BREN memberi sinyal kuat bahwa energi terbarukan bukan lagi isu pinggiran, melainkan arus utama ekonomi nasional. Namun, euforia pasar hanya akan berarti jika diikuti dengan implementasi kebijakan yang konsisten, transparan, dan berpihak pada rakyat. Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin transisi energi di kawasan, tetapi peluang itu datang bersama risiko besar. Tanpa keberanian, konsistensi, dan strategi yang menyeluruh, disrupsi hijau bisa berubah menjadi sekadar slogan. Sebaliknya, jika kita mampu menjadikannya momentum, energi terbarukan bisa menjadi mesin pertumbuhan baru yang lebih adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan semua pihak. Inilah saatnya Indonesia membuktikan bahwa transisi hijau bukan sekadar “tren investor”, melainkan jalan strategis menuju masa depan yang lebih cerah—bagi ekonomi, lingkungan, dan generasi yang akan datang.